Judul : Polri Minta Tambahan Anggaran Rp 44,9 Triliun
Tanggal : Rabu, 02 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RAPBN 2027

Polri Minta Tambahan Anggaran Rp 44,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 44,9 triliun untuk 2027 dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp 139,19 triliun. Selain untuk kebutuhan rutin, tambahan anggaran juga diperlukan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, hingga pengamanan di daerah otonom baru.

Usulan tambahan anggaran itu disampaikan oleh Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Polri untuk Tahun Anggaran 2027.

Wahyu menjelaskan, pagu anggaran Polri tahun 2027 sebesar Rp 139,19 triliun, menurun sekitar 4,7 persen atau Rp 6,86 triliun dibandingkan dengan anggaran 2026. Dari jumlah pagu 2027 itu, sebanyak Rp 61,11 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang sebesar Rp 30,93 triliun, dan belanja modal Rp 47,14 triliun.

Padahal, pada awal perencanaan, Polri mengusulkan anggaran sekitar Rp 178,69 triliun untuk menunjang seluruh program kerja. Namun, Polri hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 118 triliun, sebelum akhirnya disesuaikan menjadi sekitar Rp 139 triliun.

Menurut Wahyu, penurunan pagu anggaran 2027 dibandingkan dengan anggaran 2026 akan berdampak signifikan, salah satunya pada pos belanja barang yang membiayai operasional harian kepolisian. "Beberapa kebutuhan yang mengalami kekurangan, antara lain, bahan bakar minyak dan pelumas, biaya listrik, pemeliharaan gedung dan almatsus (alat material khusus), serta perlengkapan perorangan. Penurunan ini juga berdampak pada tunggakan untuk anggaran BMP (bahan bakar minyak dan pelumas) dan listrik," kata Wahyu.

Penurunan anggaran akan berdampak pada kebutuhan operasional lain, seperti kebutuhan untuk daerah otonom baru dan satuan kerja baru, kebutuhan perekrutan dan pendidikan personel, serta dukungan untuk penanggulangan bencana, rusuh massa, dan pengamanan VVIP.

Apabila kebutuhan belanja barang itu belum dapat dipenuhi, lanjut Wahyu, Polri dapat mengusulkan pergeseran dari belanja modal ke belanja barang setelah memperoleh persetujuan dari DPR. Untuk itu, Polri telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

> ***Polri juga berperan aktif mendukung beberapa program prioritas nasional dan direktif Bapak Presiden.***
>
> Wahyu Hadiningrat

Polri mengusulkan pergeseran dari pos belanja modal ke pos belanja barang sebesar Rp 3,6 triliun. Dengan pergeseran ini, total pagu anggaran Polri tidak berubah, tetapi komposisinya disesuaikan agar fungsi operasional dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Total pagu anggaran Polri tahun anggaran 2027 tetap Rp 139,19 triliun. Perubahannya hanya pada komposisi jenis belanja. Belanja barang akan meningkat dari Rp 30,93 triliun menjadi Rp 34,59 triliun, sedangkan belanja modal turun dari Rp 47,14 triliun menjadi Rp 43,48 triliun," ujar Wahyu.

Mendukung program Presiden

Meski anggaran terbatas, Wahyu menekankan Polri tetap berkomitmen mendukung program prioritas nasional (PSN) tahun 2027. Polri mengalokasikan Rp 832,15 miliar untuk PSN. Sebagian besar anggaran, sekitar Rp 762 miliar, difokuskan untuk program modernisasi almatsus serta sarana dan prasarana Polri. Sisanya akan didistribusikan ke empat program strategis lain.

"Polri juga berperan aktif mendukung beberapa program prioritas nasional dan direktif Bapak Presiden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan itu antara lain untuk program ketahanan pangan, penanganan bencana dan pemulihan pascabencana, pembangunan jembatan, serta hunian sementara. Kegiatan ini juga memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar," tuturnya.

Dalam rapat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Safaruddin, sempat menanyakan apakah Polri hanya meminta pergeseran anggaran atau sekaligus tambahan anggaran. Jika memang keduanya, Fraksi PDI-P menyatakan akan tetap menyetujui.

Menjawab pertanyaan itu, Wahyu menyampaikan pihaknya masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 45 triliun untuk memenuhi kebutuhan ideal anggaran 2027. Pagu sebesar Rp 139,19 triliun dinilai masih jauh dari kebutuhan institusi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional secara optimal.

"Namun, masih ada satu tahapan lagi di alokasi anggaran; nah, kalau kita melihat alokasi anggaran yang nanti akan muncul, kita berharap kembali ke Rp 184 sehingga lebih kurangnya Rp 45 triliun. Itu yang perlu kami sampaikan kepada pimpinan rapat. Sekali lagi terima kasih dukungannya kepada Polri selama ini," ungkap Wahyu.

Atas permintaan dari Polri itu, Komisi III DPR menyetujuinya. Dalam kesimpulan rapat disebutkan, semua fraksi di Komisi III DPR menyetujui serta memperjuangkan usulan tambahan anggaran serta program yang diajukan, yakni Rp 44,9 triliun sehingga menjadi Rp 184 triliun. Selain itu, Komisi III DPR menyetujui usulan pergeseran belanja modal ke belanja barang sebesar Rp 3,6 triliun.

Setelah disetujui Komisi III DPR, usulan tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Badan Anggaran DPR bersama pemerintah untuk disinkronkan dengan keseluruhan postur RAPBN 2027. Hasil pembahasan Banggar kemudian menjadi bagian dari proses penetapan APBN sebelum disahkan dalam rapat paripurna DPR. (DYT/BOW)